

BAB II

PENGERTIAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ) DAN *SPECIAL ECONOMIC ZONE* (SEZ)

Pada Bab 2 ini penulis akan menjelaskan pengertian umum mengenai *Free Trade Zone* (FTZ) dan *Special Economic Zone* (SEZ) dengan mengawali penjelasan mengenai latar belakang historisnya terbentuk zona khusus ini yang berbasis industrialisasi berorientasi ekspor, yang juga sesuai dengan konsep *Free Trade* dan konsep SEZ. Penjelasan tersebut penting untuk dapat memahami kedua zona khusus ini (FTZ dan SEZ) agar dapat membahas berbagai permasalahan dalam penelitian tesis ini, terutama mengenai penjelasan SEZ penulis akan memfokuskan pada penerapan SEZ di negara China yang selama ini sangat berhasil dalam pengembangan zona tersebut, dan kemudian penulis mengaitkannya dengan peralihan status FTZ menjadi SEZ di Batam.

2.1 Latar Belakang Historis

Strategi industrialisasi berorientasi ekspor hanya dapat sepenuhnya dipahami sebagai salah satu respon terhadap perubahan dramatis dalam struktur ekonomi dan politik internasional dalam dekade setelah Perang Dunia II. Pemerintah negara yang baru merdeka yang muncul di Asia dan Afrika setelah perang itu dihadapkan dengan masalah yang tampak sulit untuk mengubah sistem ekonomi warisan kolonial menjadi mandiri dan ekonomi nasional yang layak. Masalah ini masih dihadapi generasi sebelumnya ex-koloni (terutama di Amerika Latin) yang juga telah menemukan peran dalam ekonomi internasional pada pasca perang. Oleh karena itu terdapat munculnya perjuangan untuk industrialisasi.

Para perencana dan politisi negara-negara baru di masa pasca-perang melihat industrialisasi dan pembangunan sebagai hal yang sejalan dan sangat diperlukan.

Industrialisasi dipandang sebagai sarana untuk melepaskan diri dari ketergantungan kolonial melalui ekspor produk-produk pertanian dan bahan baku. Ini akan mengatasi kendala neraca pembayaran dengan diversifikasi ekspor dan setidaknya memberikan fondasi bagi ekonomi domestik, yang modern, dan mandiri.

Aliran modal internasional telah mengikuti arus perdagangan internasional. Dan merupakan bagian utama dari investasi asing, seperti bagian utama perdagangan dunia antara negara-negara maju. Namun demikian, harus diakui bahwa dengan pertumbuhan perusahaan transnasional (TNCs), produksi teknologi berskala besar yang baru dan sebuah konsekuensi baru dari divisi internasional tenaga kerja, menjadikan peran negara-negara kurang berkembang (*less developed countries/LDC*) dalam perekonomian internasional telah secara kualitatif berubah sejak tahun 1960-an.¹

Ini juga harus diakui bahwa, meskipun negara-negara kurang berkembang menempati keadaan yang rentan dan lebih atau kurang berdaya di perekonomian dunia setelah perang, tetapi sumber daya dan pasar dan kesetiaan politik mereka semua menjadi perhatian penting bagi negara-negara industri. Dari tahun 1940-an, kekuatan industri utama yang dipimpin oleh Amerika Serikat terlibat dalam upaya besar untuk merekonstruksi ekonomi pasar internasional sedemikian rupa untuk memungkinkan mereka agar mendapatkan kembali atau memperluas dominasi ekonomi mereka. Strategi Industrialisasi yang diadopsi oleh negara-negara kurang berkembang (LDCs) dari tahun 1940an dapat dijelaskan sebagai inisiatif mereka untuk pertumbuhan ekonomi. Dan mereka juga dapat menjelaskan hal itu sebagai teknik dimana pusat metropolitan pada periode pasca-kolonial menarik bekas koloni kembali ke dalam sistem internasional yang melayani kepentingan negara-negara maju.²

¹ Shoemith, Dennis, Ed. *Export Processing Zones In Five Countries, The Economic And Human Consequences*. Asia Partnership for Human Development (APHD) Agustus 1986: halaman 8.

² Magdoff, Harry. *Imperialism Without Colonies*. Ed. Roger Owen and Bob Sutcliffe. *Studies in the Theory of Imperialism*, London 1972: halaman 168.

Kelahiran industrialisasi berbasis ekspor yang secara dekat diikuti kedatangan perusahaan transnasional (TNC), dimana perusahaan-perusahaan besar melakukan investasi langsung dan produksi di lokasi dua negara atau lebih. Para TNC yang berbeda dari investasi asing memiliki kekuatan utama yang terletak pada teknologi, keterampilan dan juga bergerak bersama dengan modal.

Perubahan dalam teknologi produksi menambahkan sebuah motif baru untuk penetrasi TNC di negara-negara kurang berkembang. Tapi 'dekomposisi' proses produksi yang kompleks dan lokasi sederhana, dan juga insentif tenaga kerja merupakan bagian proses di dalam negara-negara kurang berkembang yang akan bekerja untuk TNC jika mereka bebas untuk mengekspor komponen yang telah selesai tanpa pembatasan. Strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor idealnya melayani kebutuhan ini. Relokasi bagian dari proses produksi barang yang diperuntukkan bagi pasar global memberikan TNC dan industri barat di negara asal mereka mendesak strategi ini pada negara berkembang. Terlebih, pemerintah tuan rumah negara kurang berkembang bisa dibujuk untuk menanggung sebagian biaya produksi aktual dengan menyediakan infrastruktur, situs, jasa, dan lain-lain.

Memang sebuah karakteristik strategi industrialisasi berorientasi ekspor yang sering menjadi taktik sentral telah menjadi zona pemrosesan ekspor (EPZ) atau zona perdagangan bebas (FTZ). Zonas ini merupakan kantong-kantong kecil untuk industri berbasis ekspor, dan terpisah dari ekonomi domestik negara tuan rumah.³ Berbagai istilah telah digunakan dari waktu ke waktu, mencerminkan berbagai kegiatan yang dilakukan di zona tersebut (lihat Tabel 2.1)⁴. Istilah yang paling banyak digunakan biasanya adalah *free trade zone* (FTZ), *export processing zone* (EPZ), *special economic zone* (SEZ), and *industrial free zone* (IFZ). Mereka semua memiliki beberapa fitur dasar yang sama pada umumnya.

³ Shoemith, Dennis. Op. Cit., halaman 24.

⁴ United Nations (ESCAP). Op. cit., halaman 6.

Di dalam kantong-kantong ini, perusahaan-perusahaan dari investasi asing dapat menikmati berbagai perlakuan khusus termasuk impor barang dan bahan baku yang tidak terbatas hanya pada penggunaan tanah dan bangunan bersubsidi, tetapi juga pada infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh pemerintah lokal, insentif keuangan dan perpajakan dan konsesi keabeanan serta peraturan yang sering kurang ketat atau dilonggarkan. Prosedur administratif biasanya efisien dan kontrol pemerintah disederhanakan melalui otoritas zona. Bujukan spesifik yang ditawarkan bervariasi dari satu negara ke negara lain tetapi fitur umum biasanya dibuat hampir menyeluruh untuk menghindarkan kontrol perpajakan dan impor, dengan syarat impor barang setengah jadi hanya digunakan di zona dan bahwa produk akhir yang akan diekspor.⁵

Tabel 2.1
Evolusi Istilah Zona Dari Waktu Ke Waktu

Term	Main users and date of first use
Free trade zone	Traditional term used since 19th Century
Foreign trade zone	India (1983)
Industrial free zone	Ireland (pre-1970)
Free zone	United Arab Emirates (1983)
Maquiladores	Mexico (early 1970s)
Export free zone	Ireland (1975)
Duty free export processing zone	Republic of Korea (1975)
Export processing zone	Philippines (1977)
Special economic zone	China (1979)
Investment promotion zone	Sri Lanka (1981)
Free export zone	Republic of Korea

The evolution of terminology over time (based on Kusago and Tzannatos, 1998)

⁵ Peter, G Warr. "Export Promotion via Industrial Enclaves: The Philippines Bataan export Processing Zone". Australian National University, 29 October 1984: Halaman 2.

2.2 Pengertian *Free Trade Zone* (FTZ).

Istilah *Free Trade Zone* sebagai salah satu bentuk dari zona ekonomi (*Economic Zone*) pada umumnya memiliki pengertian yang cukup beragam. Hal ini diduga sebagai akibat adanya perbedaan dalam sudut pandang atau bobot tinjauan para ahli itu sendiri tentang konsep *Free Trade Zone* tersebut. Sedangkan zona ekonomi (*Economic Zone*) menurut Capela dan Hatman (1996: 154) adalah “*The economic zone is designated regions in a country that operate under rules that provide special investment incentive, including Duty Free treatment for import and for manufacturing plants that reexport their product*”⁶

Dan perdagangan bebas (*free trade*) adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tariff (*tariff barriers*) maupun nir-tarif (bukan tarif / *non-tariff barriers*).⁷ Pengertian perdagangan bebas juga dijelaskan oleh Apridar yang telah penulis utarakan pada halaman 17 sebelumnya. Maka *Free Trade Zone* (FTZ) memiliki arti yang menurut Charles W Thurston yaitu; “*An Free Trade Zone is in essence, a tax-free enclave and not considered part of the country as far as import regulations are concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed.*”⁸

Banyak definisi lain mengenai FTZs dapat ditemukan dalam berbagai literatur, akan tetapi terdapat empat hal penting yang merupakan karakteristik utama zona perdagangan bebas (FTZs), yaitu sebagai berikut:⁹

⁶ Capela and Hatman dalam Burmansyah, Edy. “Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil”. Seri kertas Kerja Institute For Global Justice (IGJ) 2009.

⁷ Muliono, Heri. Op. cit., halaman 117-118.

⁸ Charles W Thurston dalam Burmansyah, Edy. Op. cit.

⁹ United Nations (ESCAP). Op. cit., halaman 5-6.

1. Merupakan kawasan industri yang mengkhususkan diri di bidang manufaktur untuk ekspor dan menawarkan perusahaan pada kondisi perdagangan bebas dan lingkungan peraturan yang liberal (World Bank, 1992).
2. Merupakan zona industri dengan insentif khusus yang dibentuk untuk menarik investor asing, di mana bahan impor mengalami beberapa tingkat proses sebelum diekspor kembali (ILO, 1998).
3. Merupakan area yang jelas dibatasi dan tertutup dengan wilayah pabean nasional, sering terletak pada lokasi geografis yang menguntungkan (Madani, 1999) dengan infrastruktur yang sesuai dengan pelaksanaan perdagangan dan operasional industri serta tunduk pada prinsip bea cukai dan *fiscal segregation*.
4. Dan merupakan suatu kawasan industri yang jelas digambarkan sebagai kantong perdagangan bebas dalam pabean dan rezim perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara, dimana perusahaan manufaktur asing, terutama yang melakukan produksi industri berorientasi ekspor, mendapat keuntungan dari sejumlah insentif fiskal dan keuangan (Kusago dan Tzannatos, 1998).

Untuk lebih lanjut mengenai FTZ ini akan penulis kupas lebih lanjut pada Bab 3 dalam penelitian tesis ini.

2.3 Pengertian *Special Economic Zone* (SEZ)

Sekarang ini ada beberapa tulisan yang membahas mengenai *special economic zone* (SEZ) baik pengertian, tujuan dan bagaimana penerapannya di berbagai negara seperti di Asia. *Special economic zone* sendiri memiliki pengertian yang menurut Masami Ishida merupakan sebagai wilayah geografis tertentu dengan hukum ekonomi yang lebih liberal daripada hukum ekonomi sebuah negara.¹⁰ Sedangkan menurut Wei Ge, dari perspektif luas, *special economic zone* (SEZ) dapat dicirikan yang secara umum, sebagai daerah geografis dalam wilayah sebuah negara dimana kegiatan ekonomi jenis tertentu dipromosikan oleh seperangkat instrumen kebijakan yang tidak

¹⁰ Ishida, Masami. Op. Cit., halaman 1.

umum berlaku ke seluruh negara. Secara kelembagaan, keberadaan SEZ mencerminkan fakta bahwa pemerintah tuan rumah melakukan kebijakan ekonomi sedemikian rupa yang membedakan cara kegiatan ekonomi pada wilayah geografis tertentu dalam negara tersebut.¹¹

Pendirian SEZ sendiri dapat pula bertujuan untuk pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan turunan kegiatan ekonomi tambahan lainnya.¹² Sedangkan menurut pendapat Xu Dixin dalam kerangka teoritis, SEZ memiliki fungsi yang spesifik seperti:

1. Untuk melayani dan merupakan jembatan dalam memperkenalkan modal asing, teknologi canggih, peralatan, dan sebagai ruang pembelajaran untuk pelatihan personil yang mampu menguasai teknologi canggih;
2. Untuk mempromosikan kompetisi antar wilayah, antar perdagangan, dan juga mempromosikan sebuah perdagangan tertentu, sebagai usaha untuk akhir yang lebih besar dalam mengembangkan perekonomian negara dan mempercepat produksi serta meningkatkan kualitas manajemen;
3. Untuk menyerap devisa dan untuk menyaring bagian dari modal asing, teknologi, dan peralatan melalui SEZ;
4. Untuk melayani sebagai sebuah unit eksperimen dalam reformasi struktural ekonomi dan sebagai pendidikan untuk mempelajari *law of value and the regulation of production according to market demands* (pengaturan produksi sesuai dengan permintaan pasar); dan

¹¹ Ge, Wei. "Special Economic Zones and the Opening of the Chinese Economy: Some Lessons for Economic Liberalization". World Development Vol. 27, No. 7. Bucknell University, Lewisburg, USA 1999: halaman 1268.

¹² Menon, S. Narayan, dan Soumya Kanti Mitra. Op. cit.

5. Untuk mempekerjakan banyak orang yang memang menunggu untuk adanya pekerjaan.¹³

Secara dalam penerapannya, SEZ memiliki kebijakan dasar kerangka kerja untuk SEZ (*Basic Policy Framework for SEZ*) yang sesuai dengan standar internasional, yang adalah sebagaimana pada tabel 2.2 berikut¹⁴:

Tabel 2.2
kebijakan dasar kerangka kerja untuk SEZ

Basic policy framework for SEZs	International Standard
Concept of extra-territoriality	Outside domestic customs territory, eligible for national certificates of origin, eligible to participate in national trade agreements/arrangements.
Eligibility for benefits	No minimum export requirement manufacturers & services, foreign & local firms, expansions of existing enterprises, private developers of zones.
Foreign and local ownership	No limitations, equal treatment.
Private zone development	Clearly defined in legislation; specific zone designation criteria, eligible for full benefits, competition from government-run zones on a level playing field.
Sales to the domestic market	Liberalized, provided on a blanket basis rather than case-by-case, treated as import into domestic market, subject to payment of import duties and taxes.
Purchases from domestic market	Treated as exports from domestic market; enterprises eligible for indirect exporter benefits.
Labor policies	Full consistency with International Labor Organization (ILO) labor standards, specialized dispute settlement mechanism.

Sumber: International Finance Corporation (World Bank group)

¹³ Dixin, Xu. "China's Special Economic Zones," Beijing Review., in Clyde D. Stoltenberg "China's Special Economic Zones, Their Development And Prospects". Asian Survey, Vol. 24, No. 6. University of California Press June 1984: halaman 639.

¹⁴ International Finance Corporation (IFC). *Special Economic Zones in Indonesia*. Sumber: World Bank group 2009. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2010, pukul 02.00 WIB.
<[http://www.ifc.org/ifcext/eastasia.nsf/AttachmentsByTitle/SEZ+brochure_eng/\\$FILE/Economic+Zone_english_FINAL.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/eastasia.nsf/AttachmentsByTitle/SEZ+brochure_eng/$FILE/Economic+Zone_english_FINAL.pdf)>

Dan negara yang paling sukses dalam menerapkan SEZ adalah China. Ketika pertama sekali dikeluarkannya keputusan untuk membangun *special economic zone* (SEZ), China tidak memiliki pengalaman dalam menarik investasi asing. Ini seperti yang kita ketahui bahwa China penganut ideologi komunisme yang anti sistem kapitalisme. Strategi pembangunan yang diterapkan sebelumnya mengikuti model substitusi impor yang bersifat protektif dan menarik diri dari ekonomi global.¹⁵ Model substitusi impor inilah yang sebelumnya digunakan China dalam memenuhi kebutuhannya, artinya tujuan dari model ini untuk tidak lagi mengimpor suatu produk dari luar negeri, melainkan memproduksinya sendiri di dalam negeri. Hal inilah yang memicu terjadinya stagnansi ekonomi dan pertumbuhan yang sangat rendah, bahkan defisit di China. Untuk mengatasi persoalan ini, negara harus merubah strategi dari yang bersifat protektif dan tertutup terhadap ekonomi global menjadi lebih terbuka, salah satunya dengan menyertakan peran investor-investor asing dalam pembangunan.

Namun negara tidak dapat sepenuhnya memberikan ruang gerak bagi investor-investor asing untuk masuk. Bila tidak dilakukan secara selektif, masuknya investor asing dapat saja menggeruk sumber daya-sumber daya dan pada akhirnya juga akan menggerogoti kedaulatan negara, tanpa memberikan keuntungan yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael P. Torado bahwa:

“Perusahaan-perusahaan asing tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu negara. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka tanamkan.”¹⁶

Untuk itulah, peran zona khusus seperti SEZ dalam membuka diri terhadap ekonomi global menjadi sangat penting bagi suatu negara guna menghindarkan kekhawatiran-kekhawatiran di atas. Menurut Zhu Ying sendiri mengatakan, kebijakan

¹⁵ Chan, Steve. *East Asian Dynamism*. Colorado: Westview Press 1990: halaman 39.

¹⁶ Torado, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga Jakarta 2000: halaman 158.

pengembangan zona khusus merupakan kebijakan nasionalis yang berorientasi internasional, dan penggunaannya sebagai alat eksperimen terhadap masuknya investasi asing.¹⁷ Dengan pendekatan ini, negara bertujuan membuka diri terhadap masuknya perusahaan-perusahaan asing demi meningkatkan ekspor,. Namun, pada saat yang sama negara juga melakukan proteksi terhadap ekonomi domestik dengan mengisolasi praktik-praktik ekonomi perusahaan asing sehingga mencegah akses perusahaan-perusahaan asing tersebut terhadap pasar dalam negeri. Dengan demikian negara telah menghindarkan persaingan langsung antara perusahaan-perusahaan asing dengan perusahaan-perusahaan lokal.¹⁸

Terdapat empat *special economic zone* di China yang telah dikembangkan sejak tahun 1980. Keempat *special economic zone* tersebut adalah Shenzhen, Zhuhai, Shantou yang terletak di provinsi Guangdong. Dan Xiamen yang terletak provinsi Fujian. Di antara keempat SEZ ini, Shenzhen adalah yang terbesar yaitu seluas 372,5 km² dan sekaligus merupakan SEZ pertama yang secara resmi didirikan pada tanggal 26 Agustus 1980. Setelah Shenzhen, Zhuhai memiliki luas wilayah sebesar 6 km², Shantao 1,6km², dan Xiamen seluas 2,5 km².¹⁹ Dan dari empat *special economic zone* China tersebut, Shenzhen adalah salah satu SEZ yang selama hampir tiga dekade terakhir menjadi barometer keberhasilan dalam pengembangan zona tersebut.

Salah satu alasan pemilihan Shenzhen sebagai SEZ, selain didasarkan pada faktor lokasinya yang berdekatan dengan Hongkong, dan jga karena signifikansinya yang kecil terhadap perekonomian nasional China. Shenzhen dan juga SEZ awal lainnya, pada tahun 1970an merupakan sebagai wilayah agraris yang terbelakang. Kontribusinya terhadap provinsi pun tidak signifikan, dimana GDP dan ekspor yang disumbangkan Shenzhen terhadap provinsi Guangdong tidak lebih dari 1 (satu) persen.

¹⁷ Ying, Zhu. "The Function of Special Economic Zones in East Asian Development". In *Asian Economies Journals* June 1992: halaman 27-28.

¹⁸ Wiryawan, Bangkit A. *Zona Ekonomi Khusus, Strategi China Memanfaatkan Modal Global*. Seri Belajar dari China 1. CCS, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008: halaman 4.

¹⁹ *Ibid*, halaman 45.

Basis industri Shenzhen sangat lemah, hanya mencakup 20% dari GDP dan hanya memberikan lapangan kerja bagi seperempat buruh di daerah tersebut. Infrastruktur dan fasilitas publik juga sangat buruk di Shenzhen. Menurut banyak pengamat, justru alasan-alasan inilah yang menjadikan salah satu dasar pemilihan Shenzhen sebagai SEZ.²⁰

Dalam strategi *downward mobility* menurut konsepsi Palan dan Abbott, kebijakan industri yang dikeluarkan suatu negara harus mencakup pemberian insentif yang lebih kepada investor asing. Inti dari gagasan *downward mobility* ini adalah bahwa FDI merupakan unsur penting sebagai mesin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Beberapa alasan yang dikemukakan Palan dan Abbott, adalah bahwa dengan masuknya FDI akan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor, dan memungkinkan terciptanya rantai produksi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan lokal di negara tujuan FDI, serta yang tidak kalah penting adalah transfer teknologi dan keahlian manajemen yang lebih maju.²¹

Mengenai insentif yang dimaksud diatas, dapat kita lihat berbagai bentuk insentif pajak yang ditawarkan dalam Shenzhen SEZ yang sangat dipengaruhi oleh lokasinya yang sangat berdekatan dengan Hong Kong, dan merupakan salah satu negara tujuan FDI global. Guna menyaingi Hong Kong, negara harus memberikan insentif industri yang lebih besar. Dalam hal insentif pajak yang diberikan di Shenzhen, berlaku ketentuan sesuai dengan regulasi yang telah disetujui oleh pemerintah pusat mengenai SEZ. Besar pajak perusahaan bagi perusahaan produktif di Shenzhen di tetapkan sebesar 15%. Ini lebih rendah dari pajak perusahaan yang

²⁰ *Ibid*, halaman 81.

²¹ Ronen Palan, Jason Abbott dan Phil Deans. "State Strategies in the Global Political Economy" dalam Wiryawan, Bangkit A. Op. cit., halaman 82.

diterapkan di Hong Kong yang sebesar 18,5%.²² Data pada tabel 2.3 menunjukkan bentuk-bentuk insentif pajak di Shenzhen SEZ.²³

Tabel 2.3
Ketentuan Pajak Dalam Shenzhen SEZ Tahun 2005.

Category of tax	Taxable items	Tax rate	Remarks
Enterprise income tax	Income derived from manufacturing, business operation and other resources	15%	Manufacturing enterprise with an operation period of over 10 years are, upon their profiting year, free of taxation for the first 2 years, and levied by half for the following 3 years (8 years for hi-tech enterprise). Those enterprise with over 70% of their products exported will be levied by 10% from the 6 th year (11 th years for hi-tech enterprise) on.
Business tax	Income deriving from providing taxable service, transferring intangible assets, or selling real-estate	3-10%	-----
Individual income tax	Individual taxable income	5-45%	Individual monthly taxable income is the remaining sum of monthly income deducted 800 Yuan.
Value-added tax	Commodities import from the free trade zone and sold in domestic market	17%	Product export and transactions within the free trade zone are free of value-added taxes.
Consumption tax	Taxable consumption commodities imported via the free trade zone	3-45%	-----

Sumber: Shenzhen Daily, paper.sznews.com/szdaily, diakses 11 juni 2007.

²² Lai, "SEZ and Foreign Investment in China: Experience and Lesson for North Korean Development". in Asian Perspective, Vol.30 No.3 2006: halaman 80.

²³ Wiryawan, Bangkit A. Op. cit., halaman 83.

Terhadap regulasi buruh, negara-negara dunia ketiga, pemerintah melakukan resepsi terhadap serikat buruh dan memungkinkan kebijakan tenaga kerja yang lebih menguntungkan bagi pengusaha perusahaan dalam rangka meningkatkan keunggulan kooperatif dalam persaingan perebutan FDI.²⁴ China adalah salah satu negara yang menjalankan strategi tersebut. Untuk menarik investasi asing masuk, upah buruh ditetapkan jauh lebih rendah dari negara-negara tetangganya. Namun, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja, besaran upah buruh di Shenzhen SEZ pun ditetapkan lebih besar dari wilayah-wilayah lain di China. Seperti yang tertera di dalam tabel 2.4 tersebut.²⁵

Tabel 2.4
Perbandingan Besar Upah Buruh Nasional dan Shenzhen
(Yuan/Tahun)

Tahun	Rata-rata Nasional	Shenzhen SEZ
1980	---	---
1983	---	1.528
1984	1.048	2.023
1985	1.436	2.753
1986	1.629	2.637
1987	1.879	3.021
1988	2.382	4.148
1989	2.707	4.150
1990	2.987	4.614
1991	3.468	5.542
1992	3.966	6.347
1993	4.966	7.633

Sumber: Wei Ge, *Special Economic Zones and The Economic Transition in China*.

Dan terhadap kebijakan lahan di China juga selalu dimulai di Shenzhen. Perubahan pertama dalam sejarah agraria China pasca-reformasi dimulai di Shenzhen pada tahun 1981. Pada saat itu pemerintah daerah Shenzhen mengajukan usulan mengenai perubahan terhadap regulasi tanah agar sesuai dengan mekanisme pasar.

²⁴ Ronen Palan dan Jason Abbott. Op. cit., halaman 84.

²⁵ *Ibid*, halaman 85.

Usulan ini memungkinkan terjadinya transaksi lahan untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya di China, tanah sepenuhnya milik negara. Masyarakat dapat mengelola tanah hanya melalui perizinan dari negara. Pada masa pra-reformasi, pengelola tanah dibebaskan dari kewajiban membayar apapun. Namun, keadaan ini berubah setelah reformasi. Hak guna tanah dan sewa tanah dapat diperjual-belikan. Sewa tanah dikenakan terutama bagi kegiatan yang melibatkan modal asing.²⁶ Pada tahun 1987 reformasi lahan lebih lanjut kembali dilakukan di Shenzhen, yang kali ini memungkinkan terjadinya transaksi lahan melalui system perlelangan. Ketentuan sewa lahan di Shenzhen dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.²⁷

Tabel 2.5
Besar Sewa tanah di Shenzhen Tahun 1990-an.

Jenis Aktivitas	Periode Penyewaan	Sewa tanah Pertahun (dalam Yuan/m ²)
Industri	30 Tahun	10-30
Komersial	20 Tahun	70-200
Perumahan	50 Tahun	30-60
Turisme	30 Tahun	60-100
Pertanian	20 Tahun	Diatur terpisah
Industry Sains, Budaya, dan pendidikan.	50 Tahun	Diatur terpisah dengan keistimewaan lebih.

Sumber: Wei Ge, *Special Economic Zones and The Economic Transition in China*.

Dan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dijelaskan tersebut SEZ di China seperti halnya Shenzhen SEZ mengalami kemajuan yang pesat sampai sekarang ini, yang berawal sebagai daerah terbelakang menjadi daerah terdepan dan memajukan perekonomian China saat ini.

²⁶ Anthony Gat-on Yeh, "Foreign Investment and Urban Development in China". Dalam Wiryawan, Bangkit A. Op. cit., halaman 67.

²⁷ *Ibid*, halaman 87.

2.4 Pengalihan Status *Free Trade Zone* (FTZ) menjadi *Special Economic Zone* (SEZ) di Batam.

Pada bagian ini, penulis akan sedikit mengilustrasikan kembali pengalihan status tersebut seperti apa yang telah penulis jelaskan pada bagian latar belakang penelitian tesis ini dengan menambah sedikit pengetahuan di dalamnya. Baik pada pra-kesepakatan kerangka kerjasama Pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia yang menimbulkan pengalihan status tersebut, kemudian sedikit menjelaskan apa yang terjadi pada saat *free trade zone* (FTZ) berlaku, hingga tujuan penerapan *special economic zone* (SEZ) di Indonesia.

Dalam skala regional Internasional, Batam terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional yang melayari selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia serta berada di tengah-tengah kawasan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Dengan letaknya yang sangat strategis Batam menjadi salah satu andalan bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya dengan menetapkan berbagai status yang silih berganti dimana selama ini telah disandang oleh pulau berlokasi strategis tersebut sebagai kebijakan untuk menarik FDI bagi Indonesia. Diantaranya seperti *Bonded Zone* dan *Free Trade Zone* (FTZ).

Batam memiliki luas wilayah sebesar 415 km² dan memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industri dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak dari wilayah tersebut maupun sekitarnya. Apalagi Batam memiliki pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, membuat kawasan ini banyak diminati oleh investor lokal dan terutama investor asing.

Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi strategis ini telah membawa kemajuan ekonomi yang sangat baik. Mayoritas industri berorientasi ekspor di Batam merupakan eksistensi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Seperti

Singapura contohnya. Singapura merupakan sebuah negara yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh industri. Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kawasannya, dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura. Ibaratnya, dalam pengembangan Batam, Bapak BJ.Habibie menggunakan teori balon. Teori itu mengasumsikan, Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. Batam pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung.

Pada tahun 1990, Singapura mereposisi program restrukturisasi industrinya, yang diwujudkan melalui program regionalization 2000 (R 2000). Program ini bertujuan untuk membangun kawasan industri perkotaan di negara lain sebagai tempat baru kegiatan produksi dengan fasilitas sebagaimana persis berada di Singapura. Perusahaan-perusahaan yang dipindahkan hanya mendirikan pabriknya di negara tujuan, akan tetapi kantor pusat tetap berada di Singapura. Dengan begitu Singapura berperan sebagai basis operasional usaha mereka.²⁸ Dan Singapura pun terus melakukan peningkatan berbagai investasi di Batam yang merupakan tempat relokasi paling logis bagi negara tersebut. Hingga sebagian besar perusahaan asing yang beroperasi di Batam merupakan perusahaan Singapura, atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis operasionalnya berada di Singapura.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong sepakat untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan menyelenggarakan dan menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone—SEZ) Batam yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang. Hal itu merupakan pertanda jelas komitmen dari kedua

²⁸ Burmansyah, Edy. "FTZ BBK...". Op. cit.

belah pihak untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan dinamis yang memberikan keuntungan nyata bagi kedua negara.

Menindak lanjuti hasil MoU tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain itu, pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara *de facto* selama ini ternyata Batam menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir.

Namun apa yang terjadi adalah terdapat kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti yang sering dikemukakan adalah landasan payung hukum pembentukan FTZ, ini mengacu kepada banyak negara yang memberlakukan FTZ pada daerah dalam negaranya, yang diketahui bahwa pembentukan FTZ biasanya ditetapkan dengan Undang-Undang, hal mana secara hukum kekuatannya dapat dipertanggungjawabkan.²⁹ Pengembangan Pulau Batam saat ini masih mendasarkan kepada KEPPRES maupun Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Keputusan Menteri (KEPMEN), seperti halnya FTZ yang ditetapkan pada Batam hanya sebatas PP, yang mengakibatkan banyak tertundanya berbagai investasi asing dan juga membuat beberapa perusahaan asing yang telah melakukan kegiatan ekonomi di Batam memilih untuk hengkang dan memindahkan lokasi usahanya ke negara lain seperti China, Vietnam, India dan bahkan ke negara tetangga Malaysia.

Kemudian pada tahun 2009 Batam yang berstatus FTZ dialihkan statusnya menjadi SEZ, yang merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan

²⁹ Republik Indonesia. Bank Indonesia. Op. cit., halaman 2.

Singapura sesuai dengan MoU pembentukan special economic zone (SEZ) Batam. Dan ini ditandai dengan disahkannya UU No.39 Tahun 2009.

SEZ adalah salah satu strategi untuk menarik investasi serta meningkatkan daya saing perdagangan internasional. Belajar dari sukses pengembangan SEZ di China yang juga menggandeng Singapura, pola kerja sama seperti itu akan diaplikasikan di Indonesia. Tetapi bagi penulis sangat disayangkan saat Indonesia memberlakukan SEZ bagi Batam status FTZ di hapuskan. Tidak seperti halnya China yang telah sukses mengembangkan SEZ, tidak menghapuskan FTZ yang berada dalam SEZ itu sendiri. Hal ini nantinya akan penulis bahas pada Bab 3 dalam penelitian tesis ini.

Tujuan penerapan SEZ di Indonesia khususnya Batam, sama halnya dengan negara-negara lain seperti China, India dan Vietnam yang terlebih dahulu menerapkannya. Yaitu seperti peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor, meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal serta pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor, mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi; seperti telah dinyatakan oleh berbagai pakar atau ahli yang sudah penulis paparkan pada Bab atau bagian sebelumnya pada tesis ini. Dan ini juga akan penulis bahas pada Bab 4 dalam penelitian tesis ini.